

PEMBANGUNAN GEDUNG BARU RSUD FATMAWATI SOEKARNO TELAN ANGGARAN Rp138 MILIAR



Sumber gambar :
RSUD Ngipang Solo Batasi Pelayanan (soloraya.id)

Isi Berita:

Solo — Pembangunan gedung baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno atau RSUD Ngipang menelan anggaran sebesar Rp 138 miliar. Pembangunan secara simbolis peletakan batu pertama oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Senin (14/8). “Nilai kontrak pembangunan gedung baru sekitar Rp 138 Miliar. Pembangunan dilakukan multiyears dan ditarget rampung Agustus 2024,” kata Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Retno Erawati Wulandari, Senin (14/8). Dia menjelaskan untuk pembangunan 2023 ini sebesar Rp 45 Miliar. Dimana dana ini bersumber dari saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp 40 Miliar dan Rp 5 Miliar dari APBD

Dia mengatakan Pembangunan gedung baru pada 2024 bersumber dari APBD Rp 55 miliar dan sekitar Rp 38 Miliar dari pinjaman BLUD. Pembangunan gedung baru enam lantai akan difungsikan untuk ruang perawatan, pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), kamar operasi, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan ruangan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan PICU (Pediatric Intensive Care Unit)

“Ada layanan baru yang bakal ditawarkan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno setelah rampungnya gedung baru. Kita juga menambah poliklinik eksekutif,” katanya. “Menurut dia, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno berhasil mencatat pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 80 Miliar pada 2022. Target PAD nantinya bakal menjadi dua kali lipat setelah gedung baru beroperasi

Wakil Wali Kota Solo Teguh mengatakan pembangunan gedung baru itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit milik Pemkot Solo harus bisa bersaing dengan rumah sakit swasta dalam hal pelayanan.

“Jangan sampai kalah dengan rumah sakit swasta. Kita harus bersaing meningkatkan pelayanan dan fasilitas,” kata Teguh.

Sumber Berita :

1. <https://soloraya.solopos.com/gedung-baru-rs-ibu-fatmawati-soekarno-mulai-dibangun-ada-poliklinik-eksekutif-1712494>, “Gedung baru RS Ibu Fatmawati Soekarno Mulai Dibangun, Ada Poliklinik Eksekutif”, tanggal 14 Agustus 2023
2. <https://timlo.net/baca/68719811250/pembangunan-gedung-baru-rsud-fatmawati-soekarno-telan-anggaran-rp-138-miliar/2/>, “Pembangunan Gedung Baru RSUD Fatmawati Soekarno Telan Anggaran Rp138 Miliar”, tanggal 15 Agustus 2023

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi